

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Kota Pematangsiantar. Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam suatu daerah merupakan suatu kegiatan yang penting atau harus dilakukan karena dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur dalam menentukan keikutsertaan masyarakat dalam hal menuju masyarakat lebih baik dan disiplin. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi titik focus adalah Bagaimana Peran Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran dikota Pematangsiantar.

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dariterjadinya interaksi social antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dapat menimbulkan ketidakmajuan pemerintahan suatu daerah. inisiatif dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sama sekali belum memadai. pemerintahan daerah yang mengharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam berpartisipasi menjadi kecewa karena tindakan masyarakat yang cenderung kurang aktif.

Penduduk merupakan elemen penting di suatu wilayah dalam sebuah negara, untuk itu masalah kependudukan merupakan masalah urgen yang perlu ditangani dengan serius. Kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan harus tertata dengan baik, serta didukung dengan administrasi kependudukan yang dapat mengorganisir keadaan penduduk.

Peristiwa-peristiwa penting dalam fenomena kehidupan manusia wajib dicatatkan, pencatatan-pencatatan tersebut antara lain peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. perlunya dicatatkan peristiwa-peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan keabsahan identitas warga Negara.

Seperti dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 yang berbunyi “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Kondisi kependudukan mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam administrasi kependudukan meliputi perkembangan IPTEK yang terkait dengan kependudukan. Perkembangan penduduk juga menuntut tersedianya penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan jujur. Hal ini dikarenakan kebutuhan penduduk yang semakin beragam seperti tersedianya akses administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penataan dalam administrasi kependudukan.

Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap penataan administrasi kependudukan yakni dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lembaga yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di setiap Kabupaten atau Kota.

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Salah satu pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak

secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Secara umum cara pembuatan Akta Kelahiran tidaklah sulit. seperti yang dijelaskan dalam pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain:

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. KK orangtua
4. KTP orangtua
5. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orangtua.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2) jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dalam hal ini termasuk didalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi di tempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran. selanjutnya, pasal 27 ayat (2) Undang-Undang mensyaratkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat catatan sipil akan membuat catatan

pendaftaran dan mengeluarkan kutipan akta kelahiran. berdasarkan hukum diatas, orangtua diminta untuk segera mendaftar untuk akta kelahiran secepat anak mereka lahir.

Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk sangatlah penting keberadaannya, mengingat sebagai warga Negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita telah menaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan keberadaannya juga dilindungi secara hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut juga telah dirasakan secara langsung salah satunya dengan memiliki Akte Kelahiran.

Kelahiran seorang anak dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga, dimana orangtua sebagai pemikul tanggung jawab turut berpartisipasi dalam memastikan bahwa anak dibesarkan dengan benar sehingga dapat tumbuh menjadi seseorang yang berarti, termasuk dalam memastikan bahwa anak secara hukum terdaftar dengan cara akta kelahiran dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatra Utara dengan jumlah penduduk 321.450 jiwa, yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. adapun 8 kecamatan tersebut terdiri atas Siantar Timur, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Marihat, Siantar Selatan, Siantar Martoba, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marimbun.

Masyarakat di Kota Pematangsiantar memiliki kesadaran hukum yang masih kurang terhadap kepemilikan akta kelahiran, padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki setiap anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya akta kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mementingkan kepemilikan akta kelahiran. Masyarakat memandang bahwa akta kelahiran hanya sebagai syarat administratif saja, yaitu untuk masuk sekolah dan melamar kerja. Sehingga sangat sulit untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat akta kelahiran atas kesadaran hukum yang timbul dari dirinya sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul “Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Di Kota Pematangsiantar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Kota Pematangsiantar

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahirandi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak secara umum, yaitu:

1. Bagi penulis

Bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir setiap gejala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

2. Bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pematangsiantar

Bermanfaat dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran untuk Menciptakan Tertib Administrasi Daerah.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan

Bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi ilmiah khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

“Secara harafiah menurut William Wiersema yang dikutip oleh Sugiyono, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis”¹. Maksudnya adalah teori tersebut memiliki fungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan masalah. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa teori tersebut berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan, serta sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.²

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Kesepuluh, Alfabeta: Bandung, 2010, Hal.52

²<http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>

2.1.1.1 Norma Masyarakat

Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat dikenal ada empat tingkatan norma yaitu sebagai berikut:

a. Cara (Usage)

merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya.

b. Kebiasaan (Folksway)

Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.

c. Tata Kelakuan (Mores)

Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur.

d. Adat istiadat (Custom)

Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat.

2.1.2 Pengertian Partisipasi

“Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan”³. Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster,1976). keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi social antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.

³dr.Aprillia Theresia, NTP, M.Si, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Cetakan Kedua, Alfabeta: Bandung, 2015, Hal.196

4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.⁴

2.1.2.1 Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldorp (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya manusia
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.⁵

2.1.2.2 Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan adanya 5 tingkatan yaitu:

1. Memberikan informasi (information)

⁴Ibid., Hal.197

⁵Ibid., Hal.200

2. Konsultasi (consultation)

yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

3. Pengambilan keputusan bersama (deciding together)

dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

4. Bertindak bersama (Acting together)

dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest)

dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.⁶

2.1.2.3 Derajat Kesukarelaan Partisipasi

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp (1981) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut:

1. Partisipasi spontan

⁶Ibid., Hal.202

yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan-nya sendiri.

2. Partisipasi terinduksi

yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan

yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisi atau dikucilkan masyarakatnya.

4. Partisipasi tertekan oleh alasan social-ekonomi

yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status social atau menderita kerugian/ tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

5. Partisipasi tertekan oleh peraturan

yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.⁷

2.1.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Menurut Angell (dalam Ross, 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak factor. factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan factor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah

⁷Ibid., Hal.203

tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap

lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.⁸

2.2 Akta Kelahiran

Pengertian Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan Negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, nama orangtua serta tanda pejabat yang berwenang.⁹

2.2.1 Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pelaporan peristiwa kelahiran haruslah dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk atau orang tua anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan persyaratan. berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pencatatan kependudukan adalah:

1. Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b) Nama dan identitas saksi kelahiran;

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>

⁹<https://disdukcapilpematangsiantar.wordpress.com/03-pelayanan-capil/>

- c) KK orang tua;
 - d) KTP orang tua; dan
 - e) Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua.
2. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
3. Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a) Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
 - b) Kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua;
 - c) KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d) Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
 - e) Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
4. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

2.3 Administrasi Kependudukan

2.3.1 Pengertian Administrasi

Secara etimologis, Administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti

“pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat disebut *Administration*. pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.¹⁰

Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam Bahasa Inggris dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, atau *officer work* atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Terhadap surat yang masuk ke sebuah organisasi atau institusi misalnya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Mencatat atau mengagendakan dalam buku agenda surat masuk (seperti asal, tanggal, nomor, dan perihal surat).
- b. Mengantarkan surat tersebut kepada pihak yang dituju (kepala dinas, kepala biro, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan lain-lain)
- c. Mengetik surat balasan yang draf nya sudah disetujui pimpinan
- d. Memberi nomor surat balasan
- e. mencatat surat balasan dalam buku agenda surat keluar

¹⁰Prof.DR.H.Wirman Syafri,M.Si, *Studi tentang Adminstrasi Publik*, Erlangga: Jakarta, 2012, Hal.3

f. Menggandakan surat balasan termasuk tembusan

g. mengirim surat balasan

h. Menyimpan atau mengarsipkan salinan surat balasan yang dikirim (keluar) dan surat yang awal diterima.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas, berikut disampaikan beberapa pengertian tentang Administrasi.

John M. Pfiffner dan *Robert V. Preshtus* (1960) “One may begin by nothing that Administration is a general process which characterizes all collective effort”. “Orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa Administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama”.

Leonard D. White (1958) “Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale”. “Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public atau privat, sipil atau militer, skala besar atau skala kecil”. Pendapat ini juga menunjuk pada dua hal, yakni sebagai berikut:

a. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan).

b. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.¹¹

¹¹Ibid., Hal.9

Sondang P.Siagian (2008) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

2.3.1.1 Unsur-unsur Administrasi

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait dan bersinergi. seperangkat instrument tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. para sarjana ilmu administrasi tampaknya telah sepakat bahwa adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

sebagai wadah, organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang, pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan

¹²Prof.Dr.Sondang P.Siagian, M.P.A, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara: Jakarta,2003,Hal.2

berlangsungnya berbagai aktifitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Manajemen

Hakikat manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan (communicant) kepada orang lain (communicator) melalui suatu saluran/media (channel). kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi perlu melakukan komunikasi dengan pihak lain (didalam/diluar organisasi) dalam usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Kepegawaian

Kelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama pada suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang tidak bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa mengerjakan apa. rangkaian aktivitas menyusun dan mengatur pemanfaatan orang-orang (pegawai) yang diperlukan dalam

usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan aktivitas kepegawaian yang menjadi unsur penting dalam administrasi.

e. Keuangan

Setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang (dana). tanpa ketersediaan dana, sejumlah atau seluruh kebijakan dan program tidak akan terlaksana, yang berarti pula tidak tercapainya tujuan. unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian aktifitas yang berkaitan dengan segi-segi pembiayaan (keuangan) dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu.

f. Perbekalan

Selain organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan keuangan, perbekalan merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu perbekalan berupa sejumlah barang kebutuhan/ peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan. rangkaian aktifitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaiannya, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu merupakan kegiatan-kegiatan penting dalam administrasi.

g. Tata usaha

Tata usaha merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan),

pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama mencapai tujuan tertentu.

h. Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi melalui penciptaan hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut. tanpa dukungan dan hubungan baik masyarakat sekeliling, tujuan tidak akan tercapai.¹³

2.3.1.2 Administrasi Sebagai Ilmu

Administrasi disebut sebagai ilmu bahkan kini sudah menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri;

- a. Sebagai disiplin ilmu, administrasi memiliki objek material yaitu manusia.
- b. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek forma, dalam arti sudut pandangnya adalah penyelenggaraan.
- c. Sebagai ilmu, administrasi diterima secara universal di seluruh dunia.
- d. Sebagai ilmu, administrasi juga dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga berbagai perguruan tinggi mendirikan jurusan dan kajian administrasi pada berbagai strata.

¹³Wirman Syafri, Op.Cit., Hal.11

- e. Ilmu administrasi juga mempunyai sistematika yang khas.¹⁴

2.3.2 Pengertian penduduk

“Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”¹⁵. dimana setiap penduduk memiliki hak dan kewajiban.

Adapun hak penduduk ialah:

1. Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Perlindungan atas Data Pribadi;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Kewajiban penduduk ialah:

1. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

¹⁴Drs.H.Inu Kencana Syafiie, M.Si, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003, Hal.7

¹⁵Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

2. Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

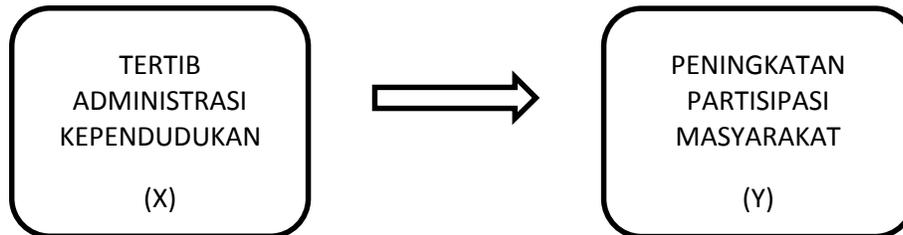
2.3.3 Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2013 pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu:

1. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk
2. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil
3. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.4 Kerangka Berfikir



2.5 Hipotesis

Pengertian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.¹⁶ Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Hipotesis berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja. sebagai lawannya adalah hipotesis nol. hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan keandalannya. Pengujian hipotesis secara kuantitatif dapat dilakukan melalui

¹⁶Prof.Dr.Sugiyono,*Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke Sembilan Belas, Alfabeta: Bandung, 2011, Hal.70

statistika. dalam analisa data hasil perhitungan yang statistic yang signifikan mengharuskan hipotesa alternative ditolak dan sebaliknya hipotesis nol diterima.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Ha: (1). Terdapat Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran.

Ho: (1). Tidak terdapat Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran.

2.6 Defenisi Konsep

a. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

2.7 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹⁷

Hipotesis yang diajukan yaitu ada Pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran. maka terdapat dua variabel dalam hipotesis tersebut, yaitu variabel *independen* (Variabel bebas) yaitu Tertib Administrasi Kependudukan (X) dan *variabel dependen* (Variabel tidak bebas/terikat) yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran (Y).

¹⁷Prof.Dr.Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, 2012, Hal.85

Tabel 2.1
Indikator Defenisi Operasional

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Mengatur Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Administrasi • Penyesuaian Tugas
		Mengelola Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara pengelolaan Administrasi • Pengelolaan Perlengkapan Administrasi
		Menertibkan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban Administrasi oleh pegawai
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran	Keterlibatan Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Masyarakat tentang Akta Kelahiran • Pemahaman Masyarakat mengenai Prosedur/ pembuatan Akta Kelahiran
		Motivasi Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Cara memperoleh informasi mengenai pembuatan Akta Kelahiran • Kesadaran Masyarakat
		Tanggung Jawab Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kepengurusan akta kelahiran oleh orangtua

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Metode Penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif lebih menekankan kepada cara berfikir yang lebih positif yang bertitik tolak dari fakta sosial yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik. Dengan menggunakan metode kuantitatif penulis dapat menyajikan hasil penelitian yang berupa data statistik yang mudah dipahami dan dapat digeneralisasikan pada keadaan dan kondisi yang berbeda.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, Jl.Melanthon Siregar No.36, Pematangsiantar.

¹⁸Sugyono, Op.Cit., Hal.2

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹

Dimana populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Masyarakat Pematangsiantar di Kecamatan Siantar Marihat sebanyak 21.151 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti.²⁰ Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. dimana yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pematangsiantar di Kecamatan Siantar Marihat.

Untuk menentukan sampel yang representative maka digunakan teknik Probability Sampling yaitu Simple Random Sampling. Dimana alasan penulis menggunakan

¹⁹Sugyono, Op.Cit., Hal.80

²⁰Sugyono, Op.Cit., Hal.81

Simple Random Sampling adalah karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Dari 21.151 Masyarakat Kecamatan Siantar Marihat maka akan dilakukan penghitungan nilai sampai dengan rumus Tharo Yamane, dimana tingkat presisi yang dipakai adalah 10 % (0,1) %.

Rumus Taro Yamane :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi yang ditetapkan

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{21151}{21151 (0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{21151}{21151 \cdot 0.01 + 1}$$

$$n = \frac{21151}{212.51} = 99.52$$

Dari perhitungan tersebut hasil sebanyak 100 orang Masyarakat Kecamatan Siantar Marihat sebagai sampel dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

3.4.1. Data primer

Data primer yaitu data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Teknik ini dilakukan melalui:

1. Metode Koesioner

Koesioner yaitu sebagai cara memberikan angket pertanyaan langsung kepada responden berupa pertanyaan tertentu dan menyajikan beberapa alternative jawaban yang sudah ditentukan.

2. Metode Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh sejumlah data dari suatu lembaga yang dipersiapkan atau di dokumentasikan. Metode observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Data sekunder umumnya berupa (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti petunjuk pelaksana, petunjuk teknis serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.5 Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Alasan menggunakan metode pengukuran skala Likert, karena peneliti menggunakan sistem penyebaran angket sehingga hasilnya digolongkan dalam skala data, yaitu ordinal interval.

Tabel 3.1
Skala Likert

Pilihan Jawaban	Bobot atau Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.²¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah teknik analisis kuantitatif yaitu analisa terhadap data yang di peroleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang di peroleh di lapangan.

²¹Sugyono, Op.Cit., Hal.147

3.6.1 Uji Validitas

Suatu skala dikatakan mempunyai kesahihan atau validitas, bila skala itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pada instrumen tersebut, dimintakan tanggapan kepada responden dengan memberikan nilai (skor) pada setiap butir pertanyaan atau pernyataan. Validitas instrumen ditentukan dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa 0,1 maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid.

Rumus yang digunakan untuk mencari korelasi adalah korelasi *Pearson Product Moment* yang dirumuskan sebagai berikut :

Rumus Product Moment

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

Rxy = angka indeks korelasi “r” Product Moment

N = Populasi

xy = Jumlah Perkalian antar skor

x = Jumlah skor X

y = Jumlah skor Y

Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai r dalam tabel pada $\alpha=0,1$ maka berarti signifikan, sehingga disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu valid.

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua variabel berdasarkan nilai r digunakan penafsiran interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	SangatRendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangatkuat

Sumber: Buku Sugyono dikelola oleh Peneliti

Dengan Nilai r_{xy} yang diperoleh, kita dapat melihat secara langsung melalui tabel korelasi yang menguji apakah r yang kita peroleh itu berarti signifikan atau tidak signifikan dapat diperoleh.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu skala dianggap reliabel yaitu dapat dipercaya, bila secara konsisten memberi hasil yang sama diterapkan pada sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach*. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Alfa Cronbach* semakin dekat *Alfa Cronbach* dengan 0.6 semakin tinggi reliabilitasnya dalam suatu penelitian.²²

Kemudian untuk mencari koefisien reliabilitasnya maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{tot} = \frac{2(r_{tt})}{1 + r_{tt}}$$

Keterangan :

r_{tot} = Angka keseluruhan reliabilitas

r_{tt} = Angka korelasi pertama dan kedua

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametric. Normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara

²²Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2010, Hal.76

normal atau tidak. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk populasi kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui *pendekatan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Tes* dan pendekatan grafik (*grafik histogram* dan *Normal P-P Plot*).

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Standard Delete Residual* nilai tersebut. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode grafik dalam program SPSS dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar dalam scatterplot.

Berikut adalah dasar pengambilan keputusan :

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi

korelasi kuat, terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Menurut Ghozali dalam buku Duwi Priyatno, “cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.4. Regresi linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel tergantung (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel tergantung apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan.

Rumus regresi Linear Sederhana adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel tergantung (dependent) yang diprediksi

X = Variabel bebas (independent)

a = Nilai Konstanta

b =Koefisien regresi

e =Error

3.6.5 Uji t (Uji parsial)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka harus dilakukan uji t dengan rumus :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

r = t hitung yang dikonsultasikan dengan t table

r = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

H_0 : $b_1 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran)

H_1 : $b_1 \neq 0$ (Terdapat pengaruh Tertib Administrasi Kependudukan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran)

Alat uji yang digunakan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan ketentuan apabila hasil $t_{hitung} > t_{table}$ maka H_0 ditolak demikian sebaliknya H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{table}$.

3.6.6 Koefisien Determinan (R^2)

Teknik ini digunakan untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai Koefisien Product Moment Person.